



Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Warga Kepulauan Madura

^{1*}Mohammad Hidayatullah, ²Ahmad Hasan Ubaid

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM 05 Patean, Sumenep, Jawa Timur 69451
²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145

*Corresponding author: hidayatullah@wiraraja.ac.id

Diterima: Juli 2022; Revisi: Juli 2022; Diterbitkan: Agustus 2022

Abstrak: Pengabdian ini dilakukan untuk memberi solusi alternatif dari persoalan yang dihadapi oleh warga Kepulauan Madura, yaitu minimnya kesadaran terhadap hak-hak politik dan pembangunan. Pengabdian ini dilakukan dengan metode dialog, yaitu pengabdian melakukan kegiatan bersama sasaran, yang dilakukan secara berkala selama tahun 2022, baik secara daring maupun secara luring. Daring dilakukan, untuk mengefektifkan jarak lokasi sasaran yang berada di wilayah kepulauan, sementara pengabdian tinggal di daratan. Namun untuk memantapkan kegiatan, pertemuan secara luring juga tetap dilakukan. Sasaran merasa sangat terbantu dengan kegiatan yang dilakukan, terutama dengan kehadiran pengabdian ke lokasi tempat sasaran berada. Pengabdian menemukan, selama ini warga kepulauan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam mengawal kebijakan politik yang dibuat oleh pejabat publik. Setelah dijelaskan bahwa era teknologi informasi memudahkan bagi warga untuk terlibat di dalam mengawal kebijakan, baik melalui call center, akun resmi yang dimiliki oleh Lembaga pemerintah, dan pejabat publik. Termasuk berkirim surat secara resmi ke lembaga dan pejabat publik. Diperlukan Pendidikan politik yang lebih intensif oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok civil society kepada warga Kepulauan Madura.

Kata Kunci: Hak politik; Kepulauan Madura; pejabat politik; pendidikan politik.

The Role of Political Education in Increasing Political Participation for the Residents of the Madura Islands

Abstract: This devotion is carried out to provide alternative solutions to the problems faced by the residents of the Madura Islands, that is the lack of awareness of political rights and development. This devotion is carried out using the dialogue method, in which the servant carries out activities with the target, which is carried out periodically during 2022, both online and offline. Online is carried out, to make the distance of the target location effective in the archipelago, while the servant lives on the mainland. However, to strengthen activities, offline meetings are still being held. The target feels very helpful with the activities carried out, especially with the presence of a servant to the location where the target is located. I have found that all this time the islanders do not have access to participate in overseeing the political policies made by public officials. After being explained, the era of information technology makes it easier for citizens to be involved in overseeing policies, either through call centre, official accounts owned by government agencies, and public officials. This includes sending official letters to public institutions and officials. More intensive political education is needed by the government, political parties, and civil society groups for the residents of the Madura Island.

Keywords: Political rights; Madura Islands; political officials; political education.

How to Cite: Hidayatullah, M. ., & Ubaid, A. H. . (2022). Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Warga Kepulauan Madura. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 322-329. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.745>



<https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.745>

Copyright© 2022, Hidayatullah & Ubaid
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pendidikan politik menjadi pondasi yang menguatkan dasar negara demokrasi. Buruknya demokrasi dianggap sebagai dampak dari buruknya pendidikan politik warga negara. Kesadaran politik warga negara ditentukan oleh sejauhmana pendidikan politik yang diperoleh. Pendidikan politik menjadi isu krusial yang terus mengemuka di negara demokrasi. Buruknya pendidikan politik menjadi penyebab persoalan politik tidak terselesaikan dengan baik. Malah persoalan politik terus bertambah dari waktu ke waktu. Pendidikan politik menjadi perhatian para pengamat dan ahli, tidak hanya di Indonesia, namun juga di berbagai negara-negara demokrasi di dunia, terutama dalam 10 tahun terakhir (Sypnowich, 2018).

Di Argentina, pendidikan politik yang belum membaik membuat persoalan politik menjadi beragam. Keterlibatan politik warga di Argentina tidak berlangsung sepenuhnya dan secara maksimal. Partisipasi politik warga, masih sebatas konvensional, hanya terlibat dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum digelar (Alvarez et al., 2017). Pemilih tidak berdaulat secara politik, namun lebih banyak diwakili oleh broker politik (Daby, 2021). Polarisasi politik di Argentina semakin mengemuka, yang dibarengi dengan sengketa dan konflik politik (Cerruti, 2016). Sebagai akibatnya, Argentina mengalami krisis politik yang juga bersamaan dengan krisis ekonomi yang merugikan seluruh rakyat Argentina (Busso, 2016).

Begitu pula di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru politik di Indonesia mengalami proses penyeragaman, pembungkaman terhadap kekuatan politik yang berbeda (Hartono, 2016). Begitu pula partai politik yang memiliki peran penting di dalam pendidikan politik, sebagai sarana pengkaderan calon pemimpin bangsa di pusat maupun di daerah, termasuk konstituen dan pemilih partai politik, tidak berjalan sebagaimana mestinya (Sitepu, 2016). Partai politik perlu proaktif melakukan kegiatan pendidikan politik, dan melakukan upaya merekrut calon pemimpin terbaik dari generasi bangsa (Pasaribu, 2017). Partai politik di Indonesia lemah di dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan politik (Romli, 2011). Sehingga, warga negara Indonesia secara umum, tidak memahami apa hak dan kewajibannya secara politik (Belladonna, 2018).

Tidak hanya pada skala nasional, persoalan pendidikan politik di Indonesia juga terjadi pada tingkat daerah dan lokal. Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pendidikan politik menjadi persoalan yang dihadapi warga (Suneki et al., 2021). Di Semarang, Jawa Tengah, pendidikan politik yang buruk juga menyebabkan rendahnya partisipasi politik, terutama dari kalangan generasi muda (Lestari & Arumsari, 2018). Di Yogyakarta, persoalan pendidikan politik juga menghadapi persoalan yang sama. Bedanya, persoalan politik lain yang dihadapi berkaitan dengan politik uang yang terjadi pada saat pemilihan umum (Pahlevi & Amrurrobbi, 2020). Persoalan yang berkaitan dengan pendidikan politik di kalangan generasi muda juga menjadi fenomena yang sama di Jawa Barat (Sanusi & Darmawan, 2016).

Warga negara hanya diminta untuk ikut serta menyalurkan hak politiknya pada saat kontestasi tertentu, apakah pemilihan umum, atau pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Namun setelah kandidat terpilih dan berkuasa, publik jarang sekali dilibatkan dalam keputusan

politik yang dibuat oleh pejabat publik. Publik juga merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi politiknya kepada penguasa. Begitu pula yang terjadi di wilayah kepulauan Madura, Jawa Timur, yang memiliki 128 pulau. Salah satu Kabupaten yang memiliki banyak kepulauan di Madura adalah Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep memiliki 127 pulau yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni. Di Kabupaten Sumenep, kecamatan yang paling banyak memiliki pulau adalah Kecamatan Sapeken, sehingga, selain disebut sebagai kecamatan, Sapeken disebut juga kepulauan. Warga yang tinggal di berbagai pulau di Kepulauan Sapeken, memiliki persoalan tersendiri dalam soal kesadaran hak-hak politik. Dalam konteks partisipasi politik pada saat pemilihan umum warga kepulauan cukup tinggi. Namun pada saat pejabat politik telah menduduki jabatan, warga di kepulauan cenderung apatis dengan apa yang terjadi, mereka sibuk dengan aktivitas sehari-hari mencari nafkah sebagai nelayan dan berdagang. Masyarakat semakin apatis dengan kondisi politik, karena sering dianggap sebagai objek semata-mata, bukan subjek pembangunan.

Persoalan yang terjadi pada bidang politik di Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan perlu adanya peran aktif setiap anggota masyarakat untuk mengambil bagian dari upaya untuk mencari dan memberi solusi dari persoalan yang ada. Akademisi, seperti dosen, dan lainnya dapat berperan serta memberi penyadaran dan penyuluhan terhadap warga negara dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Sehingga kontribusi akademisi bila melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran baik untuk bertanggung jawab terhadap persoalan politik. Lebih penting lagi, warga negara tidak hanya berpartisipasi pada saat pemilihan umum dan sejenisnya, namun juga terlibat langsung memberi masukan, kritik, dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh pejabat publik yang terpilih melalui proses politik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara berkala kepada warga di Kepulauan Sapeken, dalam bentuk ceramah, dan dialog, untuk memberi pemahaman dan penyadaran mengenai pentingnya berpartisipasi di bidang politik, tidak hanya pada saat kontestasi pemilihan umum digelar. Lebih dari itu, partisipasi juga dilakukan pada saat pejabat publik yang sudah dipilih menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, hak-hak politik warga negara di kepulauan tetap diperhatikan oleh pejabat politik yang telah terpilih.

Hal ini dimaksudkan pula untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan berkelanjutan sebagai program dari Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu pada tujuan keempat pendidikan inklusif dan berkualitas (*quality education*). Pendidikan secara umum untuk semua, dapat dinikmati semua kalangan, tanpa dibatasi oleh sekat jarak dan berbagai perbedaan, juga kendala (United Nations, 2020)

METODE

Metode yang digunakan di dalam pengabdian ini adalah metode dialog. Yaitu pengabdian melakukan ceramah di hadapan sasaran atau mitra kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada tahap awal, pengabdian menyampaikan materi dengan berceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab bersama peserta, sehingga pengabdian tidak hanya

berlangsung hanya satu arah, melainkan berlangsung dua arah. Peserta yang hadir terlibat dalam dialog interaktif dengan pemateri, sehingga ada tanya jawab antara pemateri dengan peserta yang hadir. Peserta yang hadir terdiri dari peserta laki-laki dan perempuan. Selain peserta orang tua, ada pula remaja dan mahasiswa yang berada di Kepulauan Sapeken. Kegiatan penyuluhan dan penyadaran hak-hak politik warga Kepulauan Madura berlangsung secara berkala pada tahun 2022.

Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan daring dilaksanakan dengan menggunakan perangkat digital platform Zoom Meeting, dalam beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota masyarakat. Penggunaan teknologi digital platform Zoom Meeting merupakan kebaruan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan digital yang dapat menjembatani jarak mitra atau sasaran pengabdian dengan tempat pengabdian berada. Sasaran dan mitra pengabdian berada di wilayah Kepulauan Sapeken, yang bila ditempuh dengan menggunakan kapal laut, membutuhkan waktu sekira 16 jam perjalanan. Penggunaan Zoom Meeting lebih efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian dilaksanakan bekerjasama dengan kelompok pegiat aktivitas sosial dan politik Aliansi Masyarakat Kepulauan (AMAN) yang ada di Pulau Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

HASIL DAN DISKUSI

Pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian berlangsung dalam beberapa kali baik secara daring maupun luring. Kegiatan daring dilakukan karena lokasi tempat tinggal pengabdian dengan sasaran cukup jauh. Pengabdian tinggal di daratan Sumenep, Jawa Timur, sedangkan sasaran berada di wilayah kepulauan Sapeken, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kegiatan yang dilakukan secara daring dan luring berlangsung secara dialogis, peserta yang hadir terlibat dialog yang intensif dengan pengabdian. Pada saat dialog, peserta tidak hanya bertanya, namun juga mengkritisi berbagai hal yang berkaitan dengan pejabat politik atau publik.

Dari dialog yang berlangsung, dapat diketahui bahwa kesadaran terhadap hak-hak politik warga Kepulauan Madura masih sangat rendah. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kontrol terhadap pejabat publik. Warga kepulauan kurang respon terhadap apa yang dilakukan oleh pejabat publik, yang terpilih secara demokratis, baik pejabat eksekutif maupun legislatif. Kalaupun warga ada yang kritis terhadap pejabat publik, objek kritik seringkali salah sasaran, yaitu mengkritisi hal-hal yang bersifat personal, bukan hal-hal yang substansial berkaitan dengan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pejabat publik. Warga juga abai terhadap kegiatan pembangunan yang berada di wilayah kepulauan. Lebih lanjut, hal ini berdampak pada kurang baiknya pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat di tingkat pelaksana. Begitu pula dengan kualitas hasil pembangunan yang merupakan program pemerintah di kepulauan juga cenderung buruk. Warga tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang dilakukan pejabat pemerintah, dan pelaksanaan program pembangunan.

Keberhasilan pembangunan di bidang politik dan demokratisasi sangat ditentukan oleh partisipasi publik (Amelung & Baumgarten, 2017).

Bahkan, pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh partisipasi publik. Di negara-negara yang tingkat partisipasi publiknya tinggi, pembangunan juga lebih cenderung berhasil. Di wilayah pedesaan di Amerika Serikat, pembangunan di bidang energi dan pangan berhasil, berkat partisipasi publik yang tinggi (Knickmeyer, 2020). Begitu pula dengan keberhasilan pembangunan dengan bidang kesehatan di Inggris, ditopang oleh besarnya partisipasi publik (Greenhalgh et al., 2019). Partisipasi publik di Maladewa juga berdampak kepada pembangunan lingkungan hidup. Partisipasi publik bahkan sampai pada tingkat mengenai analisis dampak lingkungan terhadap suatu pembangunan (Zuhair & Kurian, 2016). Hal ini semakin menguatkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Herbert McClosky yang menyebut partisipasi politik berkaitan erat dengan kebijakan publik (Ball, 2017). Sehingga, partisipasi publik di dalam pembangunan mendukung keberhasilan pembangunan, baik di perkotaan, maupun pedesaan (Rasoolimanesh et al., 2017).

Penyadaran dan penyuluhan hak-hak politik terhadap warga kepulauan yang berlangsung tidak sepenuhnya dapat diukur keberhasilannya dalam waktu yang bersamaan. Sebab keberhasilan kegiatan penyuluhan dapat diukur dengan sejauhmana partisipasi dan keterlibatan warga kepulauan dalam proses pembangunan selama satu tahun berlangsung. Dalam jangka pendek, yang bisa diukur adalah tingkat pemahaman sasaran yang hadir. Salah satunya dengan adanya interaksi dalam bentuk pertanyaan yang disamapaikan, dan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Bila diukur dengan hal tersebut, maka pada tingkat pemahaman dan pengetahuan, sasaran pengabdian sudah bisa dibilang berhasil.

Ukuran keberhasilan dalam jangka panjang dan keberlanjutan dilihat dari sejauhmana nantinya warga kepulauan bisa turut serta dan berperan aktif di dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilihan umum, maupun kontestasi politik lainnya, seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Namun juga sejauhmana keterlibatan mereka yang lebih baik lagi di dalam memberi masukan, kritik, evaluasi, dan kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan yang berlangsung di wilayah kepulauan. Bahasa lain, mereka secara aktif menjadi subjek pembangunan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Luring yang dilakukan di Pulau Sapeken, Sumenep, Madura (Sumber: Dokumentasi Pribadi Pengabdi, 2022).

Di beberapa daerah di Indonesia partisipasi publik memiliki peran penting di dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Seperti yang terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo. Salah satu faktor pendukung tingkat partisipasi adalah dorongan dari pemimpin di tingkat desa (Akbar et al., 2018). Sebaliknya, kurangnya keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan, menyebabkan kegagalan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari kegagalan pembangunan melalui dana desa, meski jumlahnya mencapai puluhan triliun, dan miliaran untuk setiap desa (Saragih & Agung, 2017).

Pemahaman terhadap hak-hak politik warga Kepulauan Madura, mengalami perbaikan, mereka memahami bahwa sekecil apapun aksi yang dilakukan untuk mengawal kepentingan politik sebagai warga, sangat besar arti dan perannya di dalam mengawal kepentingan publik. Bahwa kritik sebagai control terhadap pejabat politik/ publik, tidak lagi berkaitan dengan persoalan pribadi, namun lebih pada persoalan pekerjaan, kinerja, tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kritik tidak harus dalam bentuk datang ke kantor pemerintah, namun juga dapat dilakukan dengan cara menghubungi call center resmi kantor pelayanan pemerintah, termasuk juga melalui media sosial. Kesadaran untuk mengorganisasi diri dalam kelompok masyarakat sipil, untuk melakukan kegiatan sosial dan politik, juga bentuk lain yang positif. Salah satunya adalah dengan terlibat aktif di dalam mengawal persoalan sampah di Kepulauan Madura.

KESIMPULAN

Warga Kepulauan Madura, belum memiliki kesadaran yang baik terhadap hak-hak politik mereka. Hal ini tidak lepas dari minimnya Pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil terhadap warga Kepulauan Madura. Hal ini berdampak pada partisipasi politik warga kepulauan yang juga terbatas hanya pada saat ada kegiatan kontestasi politik saja, seperti pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Setelah pejabat politik terpilih, mereka tidak lagi berpartisipasi secara aktif, warga cenderung apatis.

REKOMENDASI

Pengabdian ini memiliki keterbatasan, terutama dari jumlah peserta yang hadir. Keterbatasan waktu dan anggaran, tidak memungkinkan pengabdian melakukan kegiatan kepada masyarakat di pulau-pulau lain yang juga memiliki banyak penduduk. Sehingga peserta yang ikut serta hanya terbatas pada satu pulau saja. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk menyadarkan hak-hak politik dan pembangunan warga di kepulauan. Pemerintah daerah, partai politik, kelompok *civil society* diharapkan lebih aktif dan intensif melakukan kegiatan penyuluhan dan penyadaran secara berkala kepada warga masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Sehingga seluruh lapisan warga kepulauan menyadari hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Kerjasama intensif juga perlu didukung oleh dana yang memadai. Hal tersebut semakin baik, bila dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

.

REFERENCES

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Alvarez, R. M., Levin, I., & Núñez, L. (2017). The four faces of political participation in Argentina: Using latent class analysis to study political behavior. *Journal of Politics*, 79(4), 1386–1402. <https://doi.org/10.1086/692786>
- Amelung, N., & Baumgarten, B. (2017). The transnational perspective of political participation: Linkages and differences between social movement and public participation studies. *Global Society*, 31(1), 3–22. <https://doi.org/10.1080/13600826.2016.1236011>
- Ball, T. (2017). Was There a Berkeley School of Political Theory? *PS - Political Science and Politics*, 50(3), 789–791. <https://doi.org/10.1017/S1049096517000609>
- Belladonna, A. P. (2018). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 31–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/pkn.v2i2.956>
- Busso, A. (2016). Neoliberal Crisis, Social Demands, and Foreign Policy in Kirchnerist Argentina. *Contexto Internacional*, 38(1), 95–131. <https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2016380100003>
- Cerruti, P. (2016). Insecurity and Fear of Crime in Argentina: Crime, Media, and Politics in Neoliberal Times. *Asian Journal of Latin American Studies*, 29(4), 25–53. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=120285875&site=ehost-live>
- Daby, M. (2021). The Gender Gap in Political Clientelism: Problem-Solving Networks and the Division of Political Work in Argentina. *Comparative Political Studies*, 54(2), 215–244. <https://doi.org/10.1177/0010414020926194>
- Greenhalgh, T., Hinton, L., Finlay, T., Macfarlane, A., Fahy, N., Clyde, B., & Chant, A. (2019). Frameworks for supporting patient and public involvement in research: Systematic review and co-design pilot. *Health Expectations*, 22(4), 785–801. <https://doi.org/10.1111/hex.12888>
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan kebijakan politik (Kajian reformasi pendidikan di indonesia masa orde lama hingga reformasi). *Jurnal Agastya*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.879>
- Knickmeyer, D. (2020). Social factors influencing household waste separation: A literature review on good practices to improve the recycling performance of urban areas. *Journal of Cleaner Production*, 245, 118605. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118605>
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(1), 63–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14602>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal*

- Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents' perceptions, community participation and support for tourism development. *Tourism Management*, 60, 147–158.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.019>
- Romli, L. (2011). Reformasi Partai Politik dan Pistem Kepartaian di Indonesia. *Politica*, 2(2), 199–220. <https://doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan budaya politik pancasila (Studi deskriptif terhadap organisasi kepemudaan gerakan pemuda ansor jawa barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24.
<https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>
- Saragih, R., & Agung, S. (2017). Peran Komunikasi politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Reformasi*, 7(1), 59–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.698>
- Sitepu, E. (2016). Peranan Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1), 1–8. <http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2016/03>
- Suneki, S., Larasati, E., Yuwanto, Y., & Fitriyah, F. (2021). Political Education as the Civic Application Engagement for Strengthening Democracy (The Case Study in Grobogan Regency). *ICISPE 2020*, 1–4.
<https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304721>
- Sypnowich, C. (2018). Lessons from dystopia: Critique, hope and political education. *Journal of Philosophy of Education*, 52(4), 660–676.
<https://doi.org/10.1111/1467-9752.12328>
- United Nations. (2020). Sustainable Development Goals: Guidelines for the Use of the SDG. In *United Nations Department of Global Communications* (Issue May).
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/>
- Zuhair, M. H., & Kurian, P. A. (2016). Socio-economic and political barriers to public participation in EIA: implications for sustainable development in the Maldives. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 34(2), 129–142. <https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1176404>